

LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGOTA DAN KELOMPOK KERJA BP3OKP
PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN FEBRUARI
NOMOR: LAP-02/BPP/PPS/III/2025



KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dana Otonomi Khusus (Otsus) disalurkan sebagai upaya strategis untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Setelah 20 tahun berjalan, Pemerintah Pusat melanjutkan penyaluran Dana Otsus dengan memperkuat payung hukumnya melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu perubahan penting yang diusung adalah penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Otsus, melalui pembentukan badan khusus, yaitu Badan Pengarah Papua.

Badan Pengarah Papua (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pembentukan BPP bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh Dana Otsus Papua. Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dengan fokus pada penggunaan Dana Otsus secara efektif dan efisien, guna mewujudkan visi pembangunan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat yaitu kompleksitas koordinasi antara lembaga dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi. Dalam

menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pembentukan Kelompok Kerja yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPP, dengan fokus pada memperkuat koordinasi, memastikan partisipasi aktif masyarakat Papua, serta menjembatani pemahaman dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Otsus. Dalam arahan presiden pada 11 Maret 2020 dikatakan bahwa “Perlunya semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, dan desain baru agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Selanjutnya dalam 5 kebijakan percepatan pembangunan Papua yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yaitu penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan tata Kelola, penguatan partisipasi & sinergi pelaku dan FOKUS pada kemanfaatan bagi OAP.

Berdasarkan misi RIPP 2022-2024 yaitu Memberikan pelayanan Pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju “Papua Cerdas”, dengan sasaran Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk Meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dimensi pembangunan yang terdiri atas Fasilitas pendidikan yang berkualitas, Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif, Distribusi tenaga pendidik yang merata, dan Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) OAP.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Maksud dari pembuatan laporan bulanan dari kelompok kerja (Pokja) Papua Cerdas BPP PPS, sebagai berikut :

- a. Dokumentasi Kegiatan: Mengumpulkan dan mendokumentasikan semua kegiatan Pokja Ppaua Cerdas yang telah dilakukan selama sebulan.
- b. Rekapitulasi Informasi: Menyusun ringkasan informasi yang relevan mengenai pencapaian, tantangan, dan pelaksanaan program kegiatan Pokja Papua Cerdas.

2.2 Tujuan

Tujuan pembuatan Laporan Bulanan Anggota kelompok kerja (Pokja) Papua Cerdas BPP PPS, adalah untuk:

- a. **Evaluasi Kinerja:** Menilai efektivitas kegiatan dan pencapaian yang telah diraih, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- b. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyediakan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai.
- c. **Perencanaan Masa Depan:** Memberikan dasar untuk perencanaan kegiatan di bulan berikutnya berdasarkan analisis dari laporan sebelumnya.
- d. **Koordinasi dan Sinkronisasi:** Memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama.
- e. **Pengambilan Keputusan:** Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pelaksanaan program.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- e. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- f. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- g. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua

4. Ruang Lingkup Kegiatan

1) Kegiatan Pendidikan:

- Pelaksanaan program pendidikan yang difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.
- Kegiatan pelatihan dan workshop bagi guru dan tenaga pendidikan.

2) Sosialisasi Program:

- Kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai program Papua Cerdas.
- Keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan anak.

3) Monitoring dan Evaluasi:

- Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, pencapaian yang diperoleh, dan tantangan yang dihadapi.
- Analisis data terkait hasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan.

4) Koordinasi dengan Stakeholders:

- Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.
- Pembahasan tentang sinergi dalam pelaksanaan program.

5) Pengembangan Sumber Daya:

- Upaya dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
- Program peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pendidik dan peserta didik.

6) Kegiatan Pendukung:

- Kegiatan lain yang mendukung tujuan pendidikan, seperti kegiatan kebersihan, lingkungan, dan sosial.

7) Rencana Tindak Lanjut:

- Rencana kegiatan untuk bulan mendatang berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari laporan sebelumnya.

B. Ringkasan Kegiatan

1. Ringkuman kegiatan yang dilaksanakan selama periode laporan.

Rangkuman kegiatan kerja bulanan Pokja Papua Cerdas BPP-PPS pada bulan Februari 2025

- 1) Membedah dan mempelajari isi Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebagai dokumen dasar hukum pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) BPP-PPS.
- 2) Membaca dan memahami tugas dan fungsi Pokja Papua Cerdas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Merancang rencana program kerja Pokja Papua Cerdas sebagai dokumen masukan Rencana Kegiatan dan Program Bulanan.
- 4) Merancang dan mengusulkan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan oleh Kanwil Papua.
- 5) Melaksanakan program kerja Audensi bersama BPKP Propinsi Papua
- 6) Membuat laporan setiap kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan.
- 7) Mengusulkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program kerja untuk direviu oleh anggota BPP-PPS
- 8) Memasukkan laporan yang telah disetujui oleh anggota BPP-PPS.

2. Pencapaian utama dan hasil yang diperoleh.

Berdasarkan rangkuman di atas diperoleh pencapaian utama dan hasil yang diperoleh Pokja Papua Cerdas selama bulan Februari 2025, dirinci sebagai berikut :

1) Rangkuman 1)

➤ Pencapaian utama

Telah dilakukan kajian dasar terhadap Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) BPP-PPS.

➤ Hasil yang diperoleh

- Pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang mengatur pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, yang menjadi landasan bagi implementasi program dan kebijakan Pokja Papua Cerdas.
- Persiapan untuk mematuhi ketentuan hukum dalam setiap langkah kegiatan Pokja Papua Cerdas.

2) Rangkuman 2)

➤ Pencapaian utama

Telah dilakukan kajian dan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi Pokja Papua Cerdas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

➤ **Hasil yang diperoleh**

- Pengetahuan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab Pokja Papua Cerdas dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan di Papua.
- Kepastian dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

3) Rangkuman 3)

➤ **Pencapaian utama**

Penyusunan dan perancangan rencana program kerja yang mencakup kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam periode bulanan.

➤ **Hasil yang diperoleh**

- Dokumen rencana program kerja yang terstruktur dan jelas, dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.
- Sinergi antara rencana kegiatan Pokja Papua Cerdas dengan rencana kegiatan yang lebih luas di Kanwil Papua.

4) Rangkuman 4)

➤ **Pencapaian utama**

Proses perancangan dan pengusulan program kerja yang telah disetujui oleh Kanwil Papua, sebagai bagian dari pelaksanaan SHEK Otonomi Khusus Papua.

➤ **Hasil yang diperoleh**

- Penataan program kerja yang telah selaras dengan kebijakan RIPP dan prioritas pengembangan di wilayah Provinsi Papua Selatan.
- Pengusulan program kerja yang komprehensif dan berbasis pada analisis kebutuhan lokal di Papua.

5) Rangkuman 5)

➤ **Pencapaian utama**

Pelaksanaan program kerja yang telah disetujui oleh Kanwil Papua dan anggota BPP-PPS.

➤ **Hasil yang diperoleh**

- Terlaksananya program-program yang dirancang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Adanya perkembangan yang nyata dalam pelaksanaan program kerja, sesuai dengan sasaran yang dituju.

6) Rangkuman 6)

➤ Pencapaian utama

Penyusunan laporan yang mencakup hasil pelaksanaan setiap kegiatan program kerja.

➤ Hasil yang diperoleh

- Dokumen laporan yang memberikan gambaran rinci tentang pencapaian kegiatan, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai tujuan.
- Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kerja yang sudah dilakukan.

7) Rangkuman 8)

➤ Pencapaian utama

Penyusunan dan pengusulan laporan hasil kegiatan untuk direviu oleh anggota BPP-PPS, sebagai bagian dari sistem evaluasi dan akuntabilitas.

➤ Hasil yang diperoleh

- Laporan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, karena telah melalui proses review oleh anggota BPP-PPS.
- Adanya masukan konstruktif dari anggota untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja.

8) Memasukkan Laporan yang Telah Disetujui oleh Anggota BPP-PPS

➤ Pencapaian utama

Pengarsipan dan pemrosesan laporan yang telah disetujui, sebagai bagian dari pelaksanaan dokumentasi kegiatan Pokja Papua Cerdas.

➤ Hasil yang diperoleh

- Dokumentasi yang rapi dan terstruktur tentang hasil-hasil kegiatan Pokja, memudahkan pelacakan dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
- Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja, serta memfasilitasi penyusunan laporan akhir untuk pihak yang lebih tinggi.

C. Detail Kegiatan

3. Tanggal, Nama Kegiatan, Lokasi, Peserta, dan Deskripsi setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Hari/Tgl/Jam		Komponen		Uraian
Minggu, 09/02/25	09.50 – 11.00	Nama Kegiatan	:	Perjalanan Merauke – Jayapura Audensi Bersama BPKP Perwakilan Papua
		Tempat/Lokasi Kegiatan	:	Merauke - Jayapura
		Penyusun	:	Pokja Papua Ceras
		Indikator	:	Laporan Pelaksanaan Program Pemda Tahun 2024
		Target Capaian	:	Tersusunnya dokumen kerja secara sistematis, terukur dan tepat sasaran
		Tantangan/Kesenjangan	:	Belum mengikuti BIMTEK dan atau pembekalan sesuai dengan prosedur yang berlaku
	11.00 – 14.30	Nama Kegiatan	:	Perjalanan Bandara Sentani – Hotel Swissbell Jayapura
	14.30 – 15.30	Nama Kegiatan	:	Makan siang
		Lokasi Kegiatan	:	Rumah Makan
Senin, 10/02/25	08.00 – 09.30	Nama Kegiatan	:	Perjalan dari Hotel – Kantor Perwakilan BPKP Papua
	09.30 – 12.30	Nama Kegiatan	:	Audensi bersama jajaran Pimpinan Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Papua
		Lokasi Kegiatan	:	Ruang Pertemuan Kantor Perwakilan BPKP Papua
	12.30 – 13.30	Istirahat	:	
	13.30 – 14.30	Nama Kegiatan	:	Lanjutan Audensi bersama unsur pimpinan BPKP Perwakilan Propinsi Papua
		Lokasi Kegiatan	:	Ruang Pertemuan Kantor Perwakilan BPKP Papua
		Penyusun	:	Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif dan staf BPP-PPS
		Indikator	:	Dokumen dan Instrumen pelaporan pelaksanaan program Pemda
		Target Capaian	:	Template Reviuw Laporan dan Program Pemda
		Tantangan/Kesenjangan	:	Branding dan Realisasi Regulasi OTSUS belum dipahami dan belum maksimal dilaksanakan dalam jajaran pemerintahan dan masyarakat.
		Link	:	

Hari/Tgl/Jam		Komponen a		Uraian
Selasa, 11/03/25		Lampiran		
	04.30 – 06.00	Nama Kegiatan	:	Checkout dari Hotel Swissbell menuju Bandara Sentani
	07.00 – 08.10		:	Penerbangan Jayapura - Merauke
		Tantangan/ Kesenjangan	:	
Selasa, 25 Februari 2024		Link Lampiran	:	
	KEGIATAN			
		Nama Kegiatan	:	Audiensi bersama penanggung jawab Pengelolaan kepegawaian pada Perguruan Tinggi yang ada di Wilayah Provinsi Papua Selatan
		Tempat/Lokasi Kegiatan	:	Ruang Pertemuan DJBP/ KPPN Merauke
		Penyusun	:	Pokja Papua Cerdas
		Indikator	:	Dosen Perguruan Tinggi Se Papua Selatan
		Target Capaian	:	Meningkatnya kualitas Dosen Perguruan Tinggi
		Tantangan/ Kesenjangan	:	1. Dosen PTS pada umumnya merupakan dosen Swasta dan tingkat pendapatan yang sangat minim. 2. Sebagian besar Dosen belum tersertifikasi karena belum memiliki NIDN/NUPTK 3. Minim atau bahkan tidak adanya bantuan pemerintah pada Perguruan Tinggi Swasta
	SUSUNAN ACARA KEGIATAN			
	09.00-09.05	Pembukaan	:	Anggota BPP, Pokja Papua Cerdas, Staf BPP dan Undangan
	09.05-09.15	Pengantar/Sambutan	:	Anggota BPP- PPS (Bpk. Yoseph Yanawo Yolmen,S.Pd.,M.Si.,MRSC)
	09.15-11.00	Pemaparan Materi	:	1. Anggota POKJA Papua Cerdas BPP-PPS 2. Wakil Rektor II Universitas Musamus 3. Perwakilan BKPSDM 4. Perwakilan Biro SDM L2Dikti
	11.00 - 12.00	Penyempai an Data dan Diskusi	:	Seluruh PT Se Papua Selatan
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00-14.00	Lanjutan Diskusi	:	Anggota BPP, Pokja Papua Cerdas, Staf BPP PPS dan Undangan dari semua Perguruan Tinggi Setanah Papua Selatan

D. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kerja pada BPKP



Gambar 1 Photo Bersama Unsur Pimpinan Kantor Perwakilan BPKP Papua



Gambar 2 Kegiatan Dialog interaktif antara Anggota BPP, Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas dan Jajaran Pimpinan BPKP Provinsi Papua



Gambar 3 Kegiatan Dialog interaktif antara Anggota BPP, Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas dan Jajaran Pimpinan BPKP Provinsi Papua

E. Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Audensi Bersama Perguruan Tinggi Papua Selatan



Gambar 4 Rapat Koordinasi/Audensi Bersama Perguruan Tinggi Se Papua SelatanKegiatan Dialog



Gambar 5 Peserta Audensi (1)



Gambar 6 Narasumber dan Peserta Audensi



Gambar 7 Narasumber dan Peserta Audensi



Gambar 8 Narasumber dan Peserta Audensi



Gambar 9 Narasumber dan Peserta Audensi

KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Pengarah Papua (BPP) selanjutnya disebut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) , berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat kordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan yang ada di Papua, yang memiliki tugas melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Kordinasi (SHEK) pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. BP3OKP ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana Otsus dan dana lainnya yang di berikan ke Papua digunakan secara efektif dan efisien guna mewujudkan visi pembangunan Papua Sehat, Papus Cerdas dan Papua Produktif.

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua menjadi lebih terarah dan jelas karena telah memiliki Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua tahun 2021-2041 yang membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. RIPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua Selatan yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga Orang Asli Papua (OAP) dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini di harapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, dan. dapat tercapai Visi Indonesia Emas tahun 2045.

Kesehatan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Papua . Program ini memilki tujuan yaitu menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar dan menjamin cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh dan membangun infrastruktur serta meningkatkan konektivitas untuk mendukung layanan kesehatan.

2. Tujuan Kegiatan

Konsultasi dan Koordinasi dengan BPKP Provinsi Papua Terkait Hasil Pelaksanaan Program Perencanaan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 di wilayah Pemerintah Papua Selatan.

3. Ruang Lingkup

Program perencanaan dan Penggunaan Anggaran tahun 2024 di wilayah Pemerintah Papua Selatan tahun 2024.

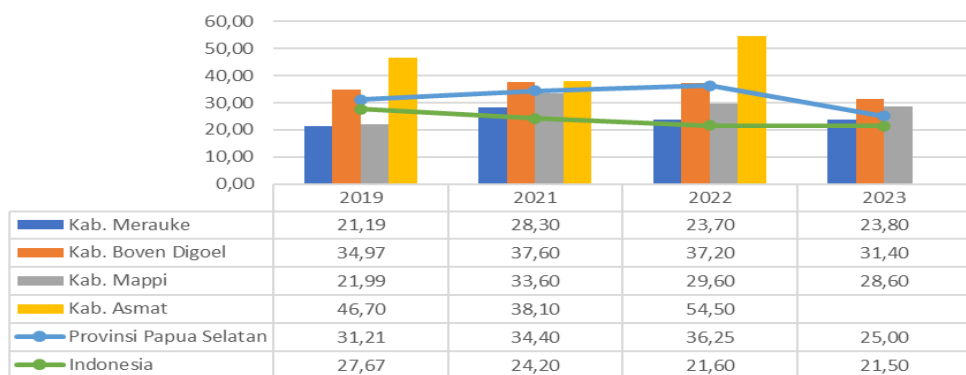
B. Hasil yang dicapai

- RIPPPI belum sepenuhnya dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan kebijaksanaan pengelolaan otonomi khusus di Papua Selatan
- Penyusunan RAP sebagai dasar penggunaan dana Otsus mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada penyaluran anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan
- Perencanaan belum sepenuhnya disinkronisasi dengan RIPPPI
- Terdapat SILPA dana otsus yang besar menunjukkan proses perencanaan dan penganggaran yang tidak baik
- Pengawasan dalam hal ini APIP daerah belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi
- Belum adanya regulasi petunjuk pelaksanaan teknis terhadap penggunaan dana otsus yang bersumber dari 1% penerimaan dana umum
- BPKP melakukan pengawasan dalam bentuk uji petik, dan untuk tahun 2024 dilakukan pada kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke
- BPKP melakukan monitoring untuk dana Otsus yaitu meminta data lewat link, tidak menguji substantif
- Untuk supaya Hasil Pengawasan BPKP bisa diadopsi oleh BP3OKP harus ada MOU di antara BP3OKP dengan BPKP
- Evaluasi perencanaan pada 5 sektor dengan tujuan indikator di setiap program bukan hanya output tapi juga outcome sehingga menyentuh masyarakat
- Harapan dari BPKP hasil Perencanaan Pemda ditindak lanjuti oleh BP3OKP

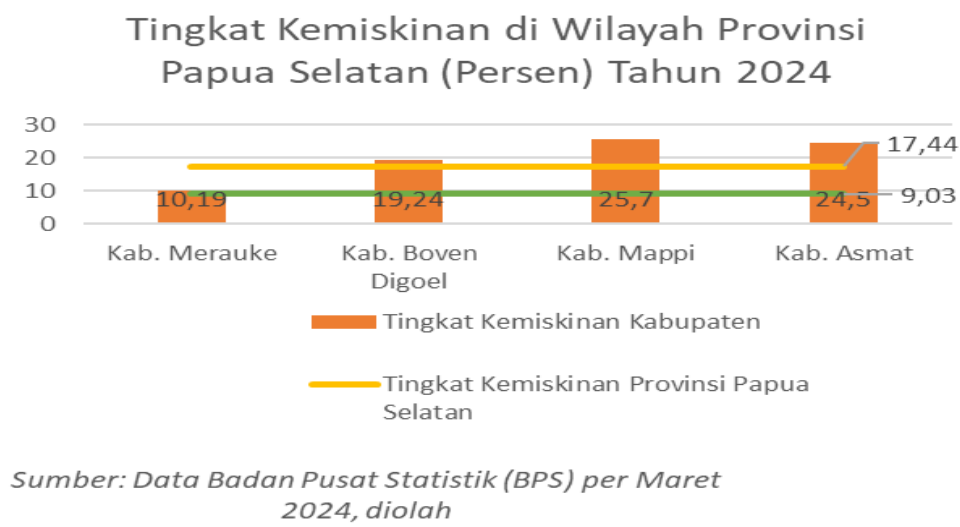
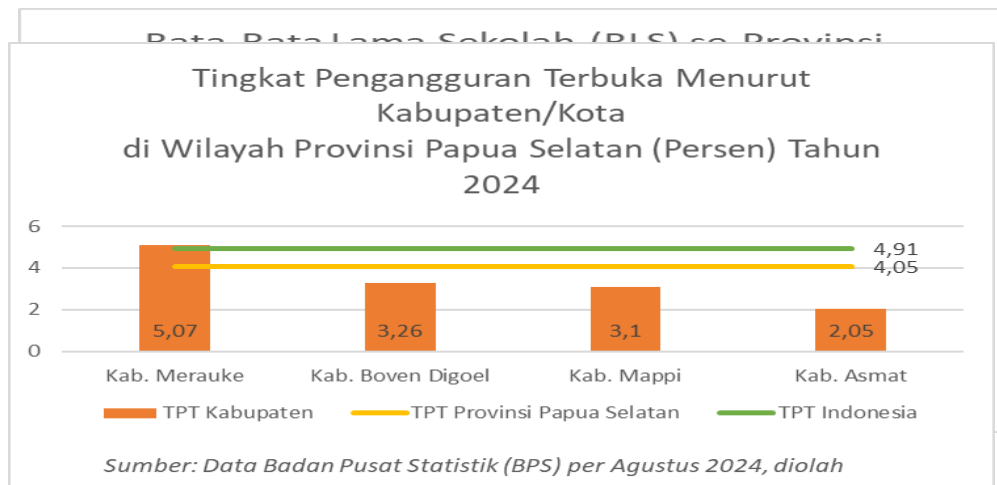
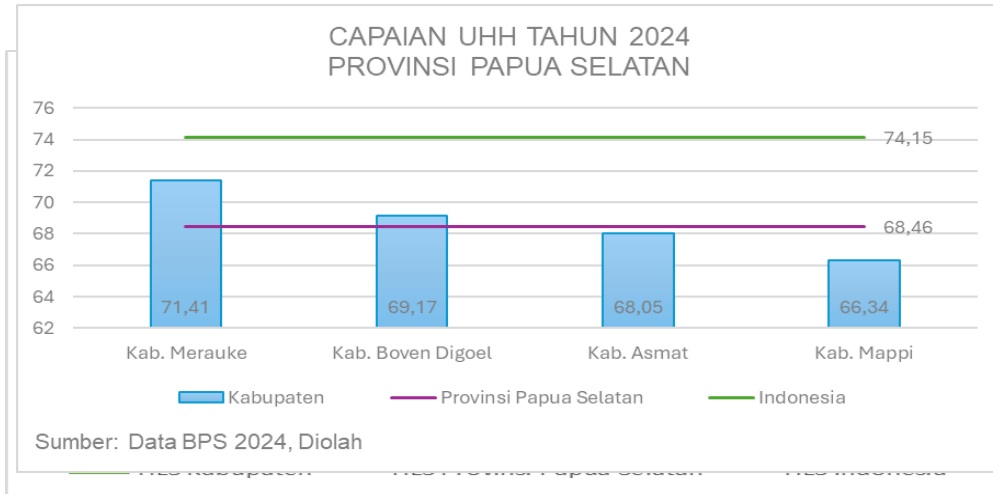
No.	Pemerintah Daerah	Persentase Alokasi Dana Otsus terhadap APBD (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1.	Provinsi Papua Selatan				17,8	22,6	20,2
2.	Kabupaten Merauke	2,18	2,5	5,55	8,05	9,66	5,59
3.	Kabupaten Boven Digoel	4,82	5,2	10,6	9,78	13,2	8,72
4.	Kabupaten Mappi	4,86	4,72	9,81	13,7	13,5	9,32
5.	Kabupaten Asmat	4,17	4,2	9,52	11,1	14,3	8,66

No.	Pemerintah Daerah	Persentase Alokasi DTI terhadap APBD (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1.	Provinsi Papua Selatan				21,9	28	25
2.	Kabupaten Merauke	0,4	0	0,18	0,8	3,52	0,98
3.	Kabupaten Boven Digoel	0	0	0,72	0,93	1,15	0,56
4.	Kabupaten Mappi	0	1,53	0,71	3,05	4,82	2,02
5.	Kabupaten Asmat	3,37	1,36	0,28	1,42	1,25	1,54

Capaian Angka Prevelelansi Stunting (APS)
Tahun 2019 - 2023 di Wilayah Provinsi Papua Selatan (%)



Sumber: Integrasi Susenas 2019-2023, dan SSGBI 2019-2023



Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektor Penanganan Stunting Tahun 2023

Nama Pemda	Nilai Asersi	Nilai yang Tidak Efektif dan Efisien	Nilai yang Efektif dan Efisien
Kab. Asmat	27.267.364.200,00	27.267.364.200,00	-
Kab. Boven Digoel	66.612.327.111,00	66.262.102.111,00	350.225.000,00
Kab. Mappi	6.987.616.321,00	524.240.000,00	6.463.376.321,00
Kab. Merauke	20.784.202.000,00	16.347.745.000,00	4.436.457.000,00
Jumlah	699.340.851.350,00	455.688.280.489,00	243.652.570.861,00

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Hasil Sektor Penanganan Stunting Tahun 2024

Nama Pemda	Nilai Asersi	Nilai yang Tidak Efektif dan Efisien	Nilai yang Efektif dan Efisien
Provinsi Papua Selatan	376.599.628.774,00	80.415.434.009,00	296.184.194.765,00
Kab. Mappi	217.779.072.442,00	217.779.072.442,00	-
Jumlah	594.378.701.216,00	298.194.506.451,00	296.184.194.765,00

C. Rencana Tindak Lanjut

- Advokasi kepada pemerintah daerah:
 1. RPJP, RPJM dan RAP harus di sinkronisasi dengan RIPP
 2. Penyusunan RAP harus tepat waktu
 3. Laporan setiap transferan maupun laporan akhir tahun di laporan kepada BP3OKP
 4. APIP dalam melaksanakan pengawasan diharapkan untuk bekerja optimal
- Hasil pengawasan BPKP dikoordinasikan kepada BP3OKP dan kemudian ditindaklanjuti oleh BP3OKP

ANGGOTA BP3OKP

Pelaksanaan kegiatan Bulan Februari Anggota BP3OKP antara lain :

1. Menghadiri rapat dengar pendapat dengan dpr provinsi papua selatan terkait penetapan calon tetap anggota dprp jalur afirmasi Provinsi Papua Selatan di kantor DPR, bersama dengan tokoh-tokoh adat dan calon anggota Dpr yang tidak terpilih.
2. Audiensi dengan kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura topik diskusi tentang fungsi pengawasan, evaluasi dan pelaporan dana otsus oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, serta ditegaskan peran penting anggota BP3OKP (BPP).
3. Inisiasi dari anggota bp3okpprovinsi papua selatan untuk melakukan rapat koordinasi dengan ibu wakil menteri dalam negeri bersama dengan ketua dpr, wakil ketua 1 dpr, dan wakil ketua ii dpr provinsi papua selatan, dengan topik diskusi tentang:
 - Usulan anggota bp3okp untuk melakukan rapat pleno dengan bapak wapres
 - Makanan bergizi gratis program presiden dan wakil presiden agar dipusatkan pada anak-anak oap yang tinggal di desa/kampung-kampung itu lebih tepat sasaran daripada makan bergizi gratis diberikan di pusat kota
 - Usulan kepada ibu wamendagri agar disampaikan kepada bapak presiden
 - Dan wakil presiden agar anggaran dari Provinsi Papua tidak di kurangi
 - Karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama diempat dob baru.
 - Dampak negatif dari pengurangan anggaran akan terasa pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terutama DOB baru.
 - Pemberdayaan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada dilingkungan pemerintah daerah untuk ikut terlibat mendukung program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang terdampak langsung dan tidak langsung dari perusahaan yang beroperasi diwilayahnya.
 - Harus ada audiensi bersama Kemendagri dengan seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Dan Anggota BP3OKP di seluruh papua untuk duduk bersama diskusi tentang implementasi RIPP dan RAPP di enam provinsi papua sesuai dengan semangat otonomi khusus di papua.
4. Rapat koordinasi tentang beasiswa LPDP dengan Direktur LPDP di Kementerian

5. keuangan, bersama anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dan wakil ketua II DPR Provinsi Papua Selatan, topik diskusi tentang beasiswa ada 3 kategori
 - Beasiswa bersifat umum
 - Beasiswa khusus orang asli papua berdasarkan marga
 - Beasiswa afirmasi bagi oap dan warga nusantara yang sudah menetap di papua selama 10 tahun terakhir.
6. Rapat koordinasi tentang Project Strategi Nasional di Merauke - Papua Selatan, bersama bapak Menteri Pertanian, bapak Sesi Djed PSN dan bupati merauke, topik diskusi ada 5 point :
 - Update PSN untuk Bupati Merauke
 - Benefit PSN untuk masyarakat OAP yang terkena dampak langsung dan tidak langsung
 - Penyediaan fasilitas sarana prasarana bagi OAP: rumah sakit, sekolah berpola asrama dan penyediaan puskesmas.
 - Penyerapan tenaga kerja untuk oap dan non OAP di Provinsi Papua Selatan
 - Ganti rugi lahan yang terkena dampak secara langsung dari PSN bagi masyarakat Marind sesuai marga masing-masing.
7. Audiensi dengan Pak Asdep (Pak Afif) di setwapres topik diskusi tentang 5 agenda utama:
 - Usulan anggota BP3OKP untuk melakukan rapat pleno dengan bapak wapres makanan bergizi gratis program presiden dan wakil presiden agar dipusatkan pada anak-anak oap yang tinggal di desa/kampung- kampung itu lebih tepat sasaran daripada makan bergizi gratis diberikan di pusat kota
 - Usulan kepada ibu wamendagri agar disampaikan kepada Bapak Presiden dan wakil presiden agar anggaran dari Provinsi Papua tidak di kurangi karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di empat DOB baru.
 - Dampak negatif dari pengurangan anggaran akan terasa pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terutama DOB baru.
 - Pemberdayaan program csr dari perusahaan-perusahaan yang ada dilingkungan pemerintah daerah untuk ikut terlibat mendukung program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang terdampak langsung dan tidak langsung dari perusahaan yang beroperasi diwilayahnya.
 - Harus ada audiensi bersama kemendagri dengan seluruh kepala daerah gubernur,

bupati dan walikota dan anggota BP3OKP di seluruh papua untuk duduk bersama diskusi tentang implementasi RIPPP dan RAPPP di enam Provinsi Papua sesuai dengan semangat otonomi khusus di papua.

8. Menghadiri acara pelantikan kepala daerah provinsi papua selatan gubernur dan empat bupati di wilayah Provinsi Papua Selatan.
9. Rapat koordinasi tentang bantuan perumahan untuk tokoh-tokoh agama di Papua Selatan, bersama bapak kementrian perumahan dan Dirjend perumahan kawasan timur indonesia dan ada 2 point penting yang kami diskusikan :
 - Bantuan perumahan untuk para pendeta. Pastor dan ustad di provinsi papua selatan (empat kabupaten: Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel)
 - Bantuan perumahan untuk orang asli papua (OAP)
10. Review curriculum vitae dari calon anggota pokja provinsi papua selatan, kemudian cv calon candidate anggota pokja (pokja papua cerdas, sehat, produktif dan polhukam) kami teruskan ke setwapres untuk direview lebih lanjut dan diterbitkan sk untuk calon anggota pokja. Total calon anggota pokja yang kami usulkan ada 14 kandidate.
11. Bimbingan Teknis (bimtek) tentang kebijakan tata kelola dana otsus papua & peran strategis BP3OKP tentang penguatan peran dan fungsi pokja BP3OKP 26 Februari 2025, disampaikan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan

Dokumentasi



Pertemuan Audiensi dengan LPDP Pusat di Kantor Kementerian Keuangan RI



Pertemuan Audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri



Pertemuan Audiensi Dengan Bapak Sedi Jed PSN Dan Bupati Merauke



Menghadiri pelantikan Kepala-kepala Daerah

Penutup

Demikian laporan Laporan Bulan Februari Tahun 2025 dalam Rangka SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Dan Koordinasi) Pelaksanaan Tugas Badan Pengarah Papua (BPP) Anggota dan kelompok kerja (POKJA) BPP-PPS, untuk digunakan sebagaimana mestinya.